

**PERAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN KOTA MALANG DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO PADA SENTRA INDUSTRI KERAMIK
DINOYO KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

NUR AISYAH KHUMAIROH

NPM 22101091131



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2025**

RINGKASAN

Nur Aisyah Khumairoh, NPM 22101091131, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang, Dosen Pembimbing I Dr. Hayat, S.AP., M.Si, Dosen Pembimbing II Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si

Pengembangan usaha mikro memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara. Negara yang maju adalah negara yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sektor ekonomi, baik formal maupun informal, guna memastikan pemerataan pendapatan bagi warganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Kelemahan usaha mikro yang penting untuk dikembangkan, (2) Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mengembangkan sentra industri keramik Dinoyo.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata terkait apa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan Sentra Industri Keramik Dinoyo. Teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan teori yang disampaikan oleh Gede Diva (2009) yaitu Teori Peran Pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, alat produksi kurang memadai, akses jalan sempit dan minimnya lahan parkir, serta penurunan jumlah pengrajin akibat kurangnya regenerasi, karena banyak generasi muda memilih bekerja di luar kota. (2) Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam pengembangan sentra industri keramik Dinoyo sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan, seperti pelatihan, program pendampingan bantuan permodalan, strategi pemasaran, dan kemudahan pelayanan perizinan regulasi NIB dan legalitas usaha.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengembangan, Usaha Mikro

SUMMARY

Nur Aisyah Khumairoh, NPM 22101091131, *Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, The Role of the Cooperative, Industry, and Trade Service of Malang City in Developing Micro Enterprises in the Dinoyo Ceramic Industry Center in Malang City, Supervisor I Dr. Hayat, S.AP., M.Si, Supervisor II Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si*

Micro business development has an important role in the progress of a country. A developed country is a country that is able to grow and develop the economic sector, both formal and informal, to ensure equal distribution of income for its citizens. The purpose of this research is to find out, (1) The weaknesses of micro businesses that are important to develop, (2) The role of the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office in developing the Dinoyo ceramic industry center.

This research method uses a descriptive qualitative approach with a case study strategy. To get a clear and real picture of what is happening in the field as a whole, then reveal descriptively about the role of the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office in the Development of the Dinoyo Ceramic Industry Center. The data analysis technique uses an interactive data analysis model according to Miles, Huberman & Saldana (2014), which includes data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. This research uses the theory presented by Gede Diva (2009), namely Government Role Theory.

The results of this study indicate that, (1) There are still various obstacles faced, such as limited facilities and infrastructure, inadequate production equipment, narrow road access and lack of parking lots, and a decrease in the number of craftsmen due to lack of regeneration, because many young people choose to work outside the city. (2) The role of the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office in the development of the Dinoyo ceramic industry center has been effective, this is evidenced by various activities, such as training, mentoring programs for capital assistance, marketing strategies, and ease of licensing services for NIB regulations and business legality.

Keywords: Government Role, Development, Micro Business

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada suatu negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Pada dasarnya pembangunan nasional merupakan bentuk akumulasi dari pembangunan daerah yang didalamnya terstruktur program-program pembangunan daerah yang harus terlaksana (Labib et al., 2020). Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan ekonomi (Pertiwi et al., 2013).

Pembangunan ekonomi mencerminkan perkembangan suatu negara dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan roda ekonomi (Kamaroellah, 2024:89). Menurut Primiana (dalam Rosintan et al., 2023) pembangunan nasional dalam pembangunan ekonomi dapat ditunjang dengan peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan potensi dan peranan yang sangat penting dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi.

Pada era otonomi seperti saat ini, pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif

dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Namun demikian, dinamika global yang semakin kompleks menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah daerah. Saat ini, tuntutan gaya hidup yang meningkat dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Selain itu, pola pikir masyarakat menjadi lebih modern dan terkonsep yang menyebabkan masyarakat dituntut untuk memiliki kebutuhan yang semakin kompleks dan tinggi. Akhir-akhir ini ekonomi dunia tidak stabil dan cenderung fluktuatif, para pelaku ekonomi harus mengikuti keadaan tersebut agar dapat melanjutkan usahanya di dunia pasar.

Respon dari pelaku ekonomi dapat dilihat dari peningkatan harga kebutuhan pokok, kenaikan tarif sehingga memiliki dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menyikapi keadaan seperti ini, respon masyarakat sangat bervariasi mulai dari menempuh pendidikan tinggi, kursus formal maupun informal yang bertujuan meningkatkan kualitas serta keahlian yang ada dalam diri mereka. Untuk meningkatkan kualitas diri mereka, masyarakat berharap agar dapat memperoleh sumber penghasilan dengan bekerja pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya (Prastika, 2017).

Kondisi yang seperti ini menyebabkan persaingan menjadi ketat. Semakin banyaknya masyarakat dengan keahlian yang serupa sehingga pekerjaan sulit diperoleh karena ketersediaan sumber daya manusia melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat

tidak menggantungkan hidupnya pada lapangan pekerjaan yang tersedia, namun sebagian masyarakat justru menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang biasanya disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Aprizal & Nurdiansyah, 2023).

Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi dapat direalisasikan melalui kegiatan berwirausaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perhatian pada pengembangan sektor usaha mikro memberikan makna tersendiri pada usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Menurut Primiana (dalam Kasih et al., 2024) pertumbuhan dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki *income* perkapita yang rendah.

Seiring dengan meningkatnya persaingan di dunia kerja, penting bagi masyarakat untuk memahami konteks pelayanan publik yang dapat mendukung potensi mereka. Dalam hal ini, konteks pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum (Hayat, 2017:21).

Pelayanan publik yang baik ditandai oleh beberapa faktor, yaitu: (1) sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, aksesibilitas, dan berdaya saing tinggi; (2) sarana prasarana yang memadai, optimal dan memenuhi standar pelayanan; dan (3) sistem atau manajemen yang baik, terarah, terukur, dan

terkendali. Dari ketiga standar pelayanan di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pelayanan yang prima dan berkualitas ketiganya harus sejalan beriringan dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya (Hayat, 2018:89). Dengan demikian, penerapan pelayanan yang baik merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan publik (Hayat et al., 2018:245).

Dengan adanya pelayanan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang memiliki peran penting dalam pengembangan sentra industri keramik Dinoyo. Menurut Halim (dalam Primandari et al., 2023:2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. UMKM selama ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman di masa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah. Keberhasilan dalam meningkatkan UMKM berarti memperkuat bisnis di masyarakat. Hal ini tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi nasional tetapi juga memperkuat pelaksanaan otonomi pemerintahan daerah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019, 99% dari total usaha yang ada di Indonesia adalah UMKM. Pertumbuhan UMKM di Indonesia tercatat sangat positif, mencapai 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang

sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini.

Data di atas menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan perekonomian. Fakta unit usaha nasional yang merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Posisi seperti itu menempatkan peran UMKM sebagai salah satu pengembangan *system* ekonomi kerakyatan sebagai wujud pembangunan ekonomi nasional (Budiarto et al., 2015:4).

Pertumbuhan dalam sektor UMKM tidak hanya mencerminkan percepatan pembangunan, tetapi juga berpotensi menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. Saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam laju perekonomian nasional hal ini dibuktikan dengan jumlah unit usaha yang ada, serta kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Wilantara & Indrawan, 2016:25).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 37,8%. Dalam konteks ini, usaha mikro yang bergerak pada sektor industri kreatif memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi daya saing di tingkat lokal maupun global.

Perkembangan UMKM juga terjadi pada Kota Malang dimana perkembangan tersebut tersebar pada seluruh wilayah Kota Malang yang dalam perkembangannya meliputi 5 Kecamatan di Kota Malang di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang. Keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap pelaku UMKM lokal sangat terus dilakukan, dengan diterbitkannya Surat Edaran Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pelaku Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang. Dalam hal ini pemerintah Kota Malang telah mengokasikan 46% pengadaan barang dan jasa diperuntukkan bagi jenis UMKM atau koperasi.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan pada kelembagaan UMKM Pemerintah membentuk Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara rinci mengatur peran

pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, termasuk ketentuan pidana dan sanksi administratif, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kemitraan, penjaminan dan pembiayaan, pengembangan usaha, penciptaan iklim usaha, serta tujuan dan prinsip pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa semua ketentuan terkait pengembangan sektor usaha di Indonesia telah diatur dengan baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

UMKM di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam penunjang perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, sehingga UMKM menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran. Untuk mendukung pengelolaan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melakukan pendataan lengkap sesuai dengan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pendataan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola data UMKM melalui basis data KUMKM, berlandaskan prinsip satu data indonesia. Pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah mengembangkan basis data tunggal KUMKM bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimana Kemenkop UKM memberikan arahan untuk memanfaatkan data dari Pusat Data Nasional milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan penyusunan standar variabel data, metadata,

kuesioner serta pengujian keamanan data bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Indikator utama dalam pendataan identitas usaha dan identitas pelaku usaha, meliputi: (1) identitas pelaku usaha, (2) identitas usaha/badan usaha, (3) karakteristik usaha secara umum, (4) sumber daya manusia, (5) proses produksi/bisnis, (6) pemasaran, dan (7) status keuangan.

Menindaklanjuti kebijakan peraturan pemerintah terbaru juga mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan UMKM di Indonesia seiring dengan semakin berkembangnya zaman dan majunya teknologi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 terkait Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus selalu bersinergi untuk melakukan pengembangan usaha mikro melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.

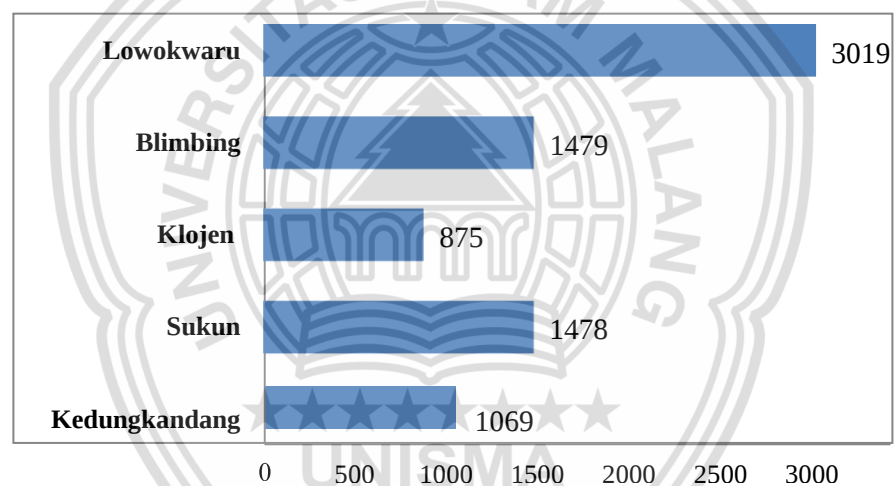
Menurut data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur terdapat 9.782.262 UMKM yang tersebar di wilayah Jawa Timur, baik dalam bidang pertanian atau non pertanian dari data tersebut di dominasi oleh usaha mikro sebanyak 93,37%, kemudian usaha kecil sebanyak 5,92%, dan usaha menengah sebanyak 0,70%. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak UMKM pada Jawa Timur pada tahap mikro, seperti halnya pada UMKM secara keseluruhan di Indonesia.

UMKM di Jawa Timur hadir bukan tanpa masalah menurut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur yang dilansir oleh Dinas Kominfo mengatakan permasalahan yang terjadi pada UMKM Jawa Timur

terdapat pada produksi, pemasaran, pembiayaan, pengambilan dan kebijakan. Keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani tantangan ini. Mengingat UMKM memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Jawa Timur, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menciptakan solusi strategis.

Melansir data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, adapun jumlah UMKM menurut kecamatan di Kota Malang (unit) pada tahun 2022 dapat diketahui berdasarkan gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Jumlah Industri Menurut Kecamatan di Kota Malang



Sumber : Diskopindag Kota Malang, 2022

Gambar 1.1 dapat diketahui jumlah UMKM tahun 2022 di Kota Malang berdasarkan kecamatan dengan total sebanyak 7920 UMKM. Jumlah tersebut dibagi dalam lima Kecamatan yaitu Kedungkandang dengan total sebanyak 1069 UMKM. Kecamatan Sukun dengan jumlah UMKM sebanyak 1478. Kecamatan Klojen sebanyak 875 UMKM sedangkan Kecamatan Blimbing dengan jumlah 1479 UMKM. Kecamatan Lowokwaru menjadi Kecamatan terbanyak jumlah

UMKM dengan total sebanyak 3019. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Kota Malang tahun 2022 didominasi oleh Kecamatan Lowokwaru.

Usaha mikro di Kota Malang berperan penting sebagai penopang ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah penduduk kota ini terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021 tercatat 844.933 jiwa, meningkat menjadi 846.126 jiwa pada tahun 2022, dan mencapai 847.182 jiwa pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya jumlah angkatan kerja yang akan mengikuti menjadi tinggi pula mengingat semakin terbatasnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha mikro di Kota Malang. Langkah ini akan membantu pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menyebabkan naiknya angka pengangguran di Indonesia. Masalah pengangguran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan, karena tingginya angka pengangguran berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Untuk mengatasi pengangguran, banyak masyarakat yang mendirikan usaha mikro yang memiliki peran penting dalam memperluas lapangan kerja serta menyediakan pelayanan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat yang dapat membantu pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat (Anisah, 2024).

Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan usaha mikro. Usaha mikro memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Salah satunya adalah Kota Malang yang menempatkan usaha mikro pada posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua orang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan, maka keberadaan usaha mikro di Kota Malang ini memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pertiwi et al., 2013).

Kota Malang termasuk salah satu kota terbesar setelah Surabaya dan merupakan daerah yang berkembang di kawasan Jawa Timur. Kota ini dikenal dengan perkembangan usaha mikro yang terus meningkat. Pertumbuhan usaha mikro di Kota Malang didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan andal, bahan baku berkualitas tinggi, jaringan pemasaran yang baik, serta dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, menurut (Jalali & Rusmiwari, 2019) Kota Malang memiliki tiga unsur pokok yang menjadi cita-cita masyarakatnya, yaitu Tri Bina Cita, yang meliputi Kota Malang sebagai Kota Industri, Kota Pendidikan, dan Kota Pariwisata.

Dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, Malang juga memiliki ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembangnya UMKM, terutama di sektor kreatif. Berbagai UMKM mampu bertumbuh dan berkembang pesat di Kota

Malang. Menurut data dari Pemerintahan Kota Malang tahun 2023, memiliki kurang lebih 8000 pelaku UMKM, yang merupakan salah satu kota yang mampu mengembangkan produk-produk kreatif di berbagai bidang, seperti kuliner, pakaian, kerajinan, dan budidaya, meskipun sebagian besar usahanya masih berkapasitas mikro. Menurut (Anggraeni et al., 2013) dalam menentukan usaha tersebut terdapat pada kelas mikro, kecil, ataupun menengah UMKM Kota Malang diukur berdasarkan indikator : omset; legalitas; kapasitas produk; kualitas produk.

Tabel 1.1 Data Jumlah Usaha Mikro Per Sektor Per Kecamatan di Kota Malang Tahun 2021

No.	Sektor	Blimbing	Lowokwaru	Sukun	Kedungkandang	Klojen
1.	Fashion	51	44	32	27	36
2.	Jasa	170	189	56	14	87
3.	Kuliner	832	940	626	392	488
4.	Kerajinan/Craft	52	19	24	27	16
5.	Lainnya	644	597	98	60	304
6.	Otomotif	17	25	3	1	19
7.	Pendidikan	4	8	0	0	4
8.	Dagang	0	0	0	0	0
9.	Pertanian / Peternakan	0	0	0	0	0
TOTAL		1770	1822	839	521	954

Sumber : Diskopindag Kota Malang, 2021

Tabel 1.1 dapat diketahui jumlah usaha mikro di Kota Malang yang telah terdata dan terdaftar dalam catatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2021. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor dan kecamatan yang ada di Kota Malang. Kecamatan Lowokwaru tercatat sebagai wilayah dengan jumlah usaha mikro terbanyak, yaitu sebanyak 1.822 unit usaha mikro. Sebaliknya,

Kecamatan Kedungkandang memiliki jumlah usaha mikro paling sedikit, yakni hanya 521 unit usaha mikro.

Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara usaha mikro masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Perkembangan usaha mikro sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha mikro yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas (Primandari et al., 2023:5).

Proses perkembangan usaha mikro tentunya diperlukan banyak dukungan dari beberapa pihak seperti Pemerintah. Pemerintah menjadi kendali utama usaha mikro dalam proses perkembangannya yang nantinya bertujuan sebagai pembangunan usaha dalam rangka menunjang perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah dalam pengembangan ekonomi sangat penting, di mana usaha mikro merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Secara umum, masyarakat suatu daerah dianggap sejahtera apabila memiliki perekonomian yang baik. Oleh karena itu, usaha mikro berperan penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional (Audina, 2021).

Di tengah perkembangan ekonomi yang cepat, keberadaan usaha mikro memiliki peranan penting. Kedudukan strategis tidak hanya tercermin pada jumlah usaha mikro yang besar. Namun, usaha mikro yang tidak pernah menimbulkan masalah dan memberatkan beban masyarakat dalam perekonomian nasional. Usaha mikro telah membuktikan dirinya sebagai bentuk usaha yang dinamis, responsif, fleksibel serta adaptif dalam merespon dinamika tantangan eksternal (Budiarto et al., 2015:5).

Usaha mikro sebagai sumber kehidupan ekonomi nasional yang telah terbukti mampu menghadapi tekanan saat badai krisis moneter melanda pada tahun 1997-1998, ketika usaha-usaha besar mengalami kebangkrutan dan meninggalkan utang besar bagi negara, usaha mikro mampu menyediakan sumber pendapatan yang stabil. Usaha mikro mampu menghasilkan pendapatan ketika industri besar menggulung tikar dan meninggalkan banyak utang kepada negara. Meski demikian, usaha mikro tetap bertahan dan mampu mendukung kelangsungan perekonomian di Indonesia (Nainggolan et al., 2017).

Perkembangan usaha mikro menjadi salah satu cara efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, karena semakin tinggi pendapatan masyarakat maka bisa dikatakan sejahtera. Dalam indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi adalah sejahteranya masyarakat oleh karena itu kenapa dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro ini sangat diperlukan kebijakan dari pemerintah dikarenakan pemerintah adalah faktor utama dalam keberhasilan pengembangan usaha mikro yang ada di Indonesia. Berkembangnya usaha mikro akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

lokal. Untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, usaha mikro ini akan menyerap tenaga kerja di sekitarnya (Fajar et al., 2024).

Menurut data Pemerintahan Kota Malang tahun 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang mencapai angka yang sangat mengesankan, yaitu 6,32%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi yang rata-rata 5,72% dan 5,73% di tahun 2018 dan 2019. Secara komparatif, pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2022 ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di level 5,34% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31%.

Di Kota Malang, beragam usaha bermunculan. Salah satu yang dapat ditemui adalah sentra industri kerajinan keramik Dinoyo. Sentra ini merupakan salah satu sentra industri dengan potensi yang cukup besar, yang dominan beroperasi dalam skala mikro. Sentra industri keramik Dinoyo terletak di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kampung Dinoyo menjadi pusat kerajinan keramik di Kota Malang, dengan fokus pada produksi berbagai jenis keramik seperti peralatan makan, vas bunga, dan souvenir. Saat ini, sentra industri keramik Dinoyo memiliki 24 pengrajin keramik yang aktif, tersebar di beberapa lokasi sekitar wilayah Dinoyo.

Sentra industri keramik Dinoyo telah menjadi pusat kreativitas dan inovasi di era globalisasi. Selain memproduksi berbagai jenis keramik seperti vas bunga, souvenir, wadah aromaterapi, dan tempat lilin, sentra ini

menyediakan ruang bagi para pengrajin untuk bereksperimen dan menyempurnakan kreasi mereka (Kartika, 2008). Sejarah sentra industri kerajinan keramik Dinoyo dimulai dari tradisi agraris masyarakat Dinoyo pada tahun 1930. Awalnya, mereka membuat gerabah untuk kebutuhan rumah tangga, seperti kendi dan teko. Pada tahun 1957, produksi mulai menggunakan tanah liat putih dan menjadi kerajinan keramik modern. Puncak perkembangannya tercapai ketika perusahaan KDM (Keramik Dinoyo Malang) didirikan untuk memproduksi keramik induk (Nainggolan et al., 2017).

Meskipun sentra industri keramik Dinoyo telah berkembang pesat di berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar, tradisi pembuatan keramik di Dinoyo tetap lestari dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, para pengrajin di Dinoyo berhasil menciptakan produk-produk keramik berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi kerajinan keramik, yang telah ada sejak lama di berbagai daerah di Nusantara, tidak hanya bertahan tetapi juga mampu berinovasi dan berkembang seiring dengan perubahan zaman (Mumtaz, 2024).

Keberadaan sentra industri di Kota Malang tersebar di beberapa wilayah. Berdasarkan data penelitian sebelumnya, sentra industri di Kota Malang tersebar di beberapa kecamatan, mayoritas berada di bagian utara kota. Beberapa di antaranya adalah sentra industri tempe sanan di Kelurahan Purwantoro, sentra industri emping jagung di Kelurahan Pandanwangi, sentra industri rotan di Kelurahan Balarjosari, sentra industri gerabah di Kelurahan Penanggungan,

sentra industri sanitair di Kelurahan Karang Besuki, sentra industri keramik di Kelurahan Dinoyo, dan sentra industri mebel di Kelurahan Tunjung Sekar (Puspitasari, 2012).

Produksi sentra industri keramik Dinoyo mulai membuahkan hasil sekitar tahun 1957, menjadikannya salah satu sektor industri produktif di Kota Malang. Industri ini menempati urutan ketiga di Indonesia setelah Lombok (NTB) dan Yogyakarta, dengan skala operasi kecil hingga menengah (Kartika, 2008). Hingga kini, terdapat 24 pengrajin aktif di Dinoyo, masing-masing toko mempekerjakan 1 hingga 5 pengrajin. Karena semakin padatnya kawasan Dinoyo, beberapa pengrajin memilih mengembangkan usahanya ke Kabupaten Malang, meskipun pasarnya tetap di Dinoyo (Wawancara, 3 Desember 2024).

Menurut Herjanto (dalam Rabbani, 2018) strategi dalam menjalankan suatu usaha sangatlah penting, salah satunya adalah pemilihan tempat usaha. Tempat usaha merupakan penentu keberhasilan dalam memasarkan produk tersebut. Lokasi bisnis yang strategis merupakan incaran bagi para wirausahawan untuk menjual produknya. Namun dalam hal ini, peneliti melihat kurang strategisnya tempat usaha yang ada di sentra kerajinan keramik dinoyo tersebut. Menurut peneliti tempat yang di jadikan tempat usaha oleh para pengrajin terlalu sempit. Tempat pemasaran sentra keramik yang di jual di rumah-rumah mengakibatkan kurang adanya lahan untuk parkir sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah konsumen (Wawancara, 3 Desember 2024).

Sentra industri keramik Dinoyo dalam perkembangannya juga menghadapi beberapa masalah dalam kegiatan produksi keramik. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Lokasi sentra yang berada di gang-gang kecil menghambat akses para wisatawan dan calon pembeli, ditambah jalan yang sempit dan tidak adanya lahan parkir. Selain itu, peralatan yang digunakan oleh pengrajin masih tergolong tradisional, seperti proses pembakaran dan pengeringan masih dilakukan secara manual melalui tungku dan sinar matahari (Wawancara, 3 Desember 2024).

Kedua, terjadi penurunan jumlah sumber daya pengrajin. Banyak pengrajin memilih untuk bekerja di luar kota, sementara generasi penerus tidak berminat melanjutkan usaha kerajinan yang bersifat turun-temurun. Ketidakmampuan mengendalikan mobilitas warga dan kurangnya regenerasi menjadi hambatan bagi pengembangan usaha ini, termasuk dalam menjadikannya sebagai sarana wisata (Wawancara, 3 Desember 2024).

Ketiga, persaingan pasar semakin ketat, baik di tingkat lokal maupun internasional. Produk impor dari negara seperti China menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha keramik Dinoyo. Hal ini dapat memengaruhi pola konsumtif masyarakat yang mana sering memilih barang impor dari pada produk lokal yang mereka anggap memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan produk kriya lokal. Jika barang dari negara lain terus masuk ke dalam negeri maka dikhawatirkan pasar keramik lokal berisiko gulung tikar seperti yang pernah terjadi sebelumnya (Wawancara, 3 Desember 2024).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pengembangan sentra industri keramik Dinoyo dinilai belum maksimal. Untuk itu melalui penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kelemahan Apa Saja yang Terdapat Pada Usaha Mikro yang Penting Untuk Dikembangkan?
2. Upaya Apa Saja yang Dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Dalam Mengembangkan Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengidentifikasi Kelemahan yang Terdapat Pada Usaha Mikro yang Penting Untuk Dikembangkan.
2. Untuk Menganalisis Upaya yang Dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Dalam Mengembangkan Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan sebagai pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam bidang Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik. Serta pemahaman mengenai peran pemerintah khususnya peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mengembangkan sektor usaha mikro yang dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang pada usaha mikro dalam upaya pengembangan sentra industri keramik Dinoyo sehingga dapat menjadikan sektor usaha mikro lebih berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta data yang diolah oleh peneliti, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Kelemahan Usaha Mikro yang Penting Untuk Dikembangkan Dalam Pengembangan Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Akses menuju sentra industri keramik Dinoyo masih tergolong kurang memadai, akibat jalan yang sempit sehingga pembeli enggan berkunjung. Lokasinya yang berada di permukiman padat penduduk juga menyebabkan minimnya lahan parkir bagi pembeli maupun wisatawan. Selain itu, peralatan yang digunakan pengrajin masih tergolong tradisional karena belum menggunakan mesin, sehingga pengerjaan pesanan dalam jumlah besar memerlukan waktu lama.

b. Penurunan Sumber Daya Pengrajin

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki pengrajin keramik berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menghasilkan produk berkualitas. Proses pembuatan keramik memerlukan keterampilan dalam mendesain, mewarnai, dan mengemas barang. Jika sumber daya pengrajin tidak memadai, maka dapat mempengaruhi kualitas produksi. Penurunan jumlah pengrajin terjadi karena banyak yang memilih bekerja di luar kota, sementara generasi penerus enggan melanjutkan usaha kerajinan ini secara

turun-temurun, sehingga jumlah pengrajin semakin berkurang.

c. Persaingan Pasar

Perkembangan industri saat ini menunjukkan tingkat persaingan yang semakin ketat, terutama dalam sektor keramik. Produk keramik sendiri memiliki banyak jenis, sehingga pengrajin harus terus berinovasi agar dapat bersaing dan tidak terpengaruh oleh persaingan dengan produsen lain. Salah satu tantangan terbesar dalam industri ini adalah dominasi produk impor, khususnya dari China yang menguasai pasar kriya. Kondisi ini memengaruhi pola konsumtif masyarakat, di mana mereka cenderung lebih memilih produk impor karena dianggap memiliki kualitas lebih baik dibandingkan kerajinan lokal.

2. Upaya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Dalam Mengembangkan Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang

a. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang telah memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sentra industri keramik Dinoyo. Pertama, produksi dan pengolahan, dinas memberikan bantuan alat berupa tungku pembakaran. Kedua, pemasaran, dinas memfasilitasi pembuatan katalog serta promosi melalui *marketplace*. Ketiga, sumber daya manusia, dinas menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan bagi para pengrajin. Keempat, desain dan teknologi, dinas juga memberikan

pelatihan penggunaan komputer untuk mendesain produk keramik.

b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Dalam hal ini pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia telah dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis pada Peraturan Walikota Malang.

c. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang berupaya mendukung industri keramik melalui berbagai program. Pertama, produksi dan pengolahan, dinas membantu pengrajin memperoleh tambahan modal melalui program pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan BRI dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Selain itu, dinas juga mendirikan UPT-LIK sebagai penyedia bahan baku keramik. Kedua, pemasaran, dinas memfasilitasi promosi melalui pameran, festival dan media sosial untuk meningkatkan daya saing produk keramik. Ketiga, sumber daya manusia, dinas bekerja sama dengan Pertamina melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan keterampilan pengrajin. Keempat, desain dan teknologi, dinas mendorong inovasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk program CSR

dan pendampingan teknologi dari institusi pendidikan guna meningkatkan kualitas produksi keramik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran terkait “Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang”, diantaranya yaitu :

1. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang hendaknya menyediakan bantuan alokasi peralatan penunjang produksi keramik, seperti mesin produksi dan alat pembakaran. Selain itu, dinas perlu bekerja sama dengan distributor alat produksi gerabah agar para pengrajin dapat memperoleh peralatan dengan harga lebih terjangkau. Hal ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya serta menekan pengeluaran produksi kerajinan keramik.
2. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang hendaknya menambah agenda berbagai kegiatan *event*, pameran, marketing setiap tahun serta menyediakan tempat usaha yang kondusif bagi pengrajin keramik untuk menampilkan produk keramiknya. Penambahan agenda pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pengrajin.
3. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang hendaknya lebih meningkatkan upaya dalam memberikan akses bantuan permodalan kepada seluruh pelaku usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro di sentra industri keramik Dinoyo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P. 2015. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Diva, G. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Hayat, Fanani, M. N. A. F., Kuntariningsih, A., Wati, A. H. Y. P., Indriyati, Masrun, J. M. F., Akibu, M. D. R. S., Hajar, S., Yunus, R. T., & Iqbal, M. M. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kamaroellah, A. 2024. *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Aplikasinya)*. Madura: UIN Madura Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. USA: SAGE.
- Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rukajat, A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarjana, S., Susandini, A., Azmi, Z., Ratnasari, K., Luhglatno, Noviany, H., & Setyowati, L. 2022. *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukiman. 2012. *Pengembangan Media Pembelajaran*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani.
- Thoha, M. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Primandari, N. R., Nazipawati, Munajad, Lindawati, & Sari, E. K. 2023. *Strategi Pengembangan UMKM*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Wilantara, R. F., & Indrawan, R. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: Refika Aditama.

Yulianti, D., & Meutia, I. F. 2020. *Perilaku dan Pengembangan Organisasi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Afandi, S. A., Arif, M., Widiyarsi, S., & Afandi, M. 2019. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Cendawan House Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*. Vol. 3, No. 3, Hal: 1–23.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. 2013. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No. 6, Hal: 1286–1295.
- Anisah, A. 2024. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Mikro*. Skripsi. Universitas Islam Malang: Malang.
- Aprizal, A., & Nurdiansyah, N. 2023. *Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Jenepono*. *AkMen Jurnal Ilmiah*. Vol. 20, No. 1, Hal: 63–72.
- Audina, S. H. 2021. *Peranan Pelatihan Terhadap Pengembangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang*. *Jurnal Bisnis Corporate*. Vol. 6, No. 1, Hal: 29–50.
- Aufar, A. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Widyatama: Bandung.
- Fajar, F., Rahmawaty Pulungan, D., Utami, E. Y., Ladjin, N., Meidiyantoro, K., Tinggi, S., & Bagasasi, I. A. 2024. *Peran Manajemen Inovasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 5, No. 9, Hal: 4418.
- Furqan, S., & Siregar, O. M. 2022. *Analisis Perekrutan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada Industri Kreatif Agensi Periklanan*. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*. Vol. 2, No. 6, Hal: 217–224.
- Hayati, B. N., Khatulistiwa, N., Puspitasari, I., & Permana, B. S. 2022. *Bulletin of Management and Business*. *Bulletin of Management and Business*, Vol. 3, No. 1, Hal: 294–304.
- Jalali, M., & Rusmiwari, S. 2019. *Implementasi Tribina Cita Kota Malang Menuju Pembangunan Berbasis Local Wisdom*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8, No. 3, Hal: 135–139.

- Kartika, L. D. 2008. *Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Agar Dapat Meningkatkan Daya Saing (Suatu Studi Pada Sentra Industri Kerajinan Keramik Dinoyo, Kota Malang*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang.
- Kartikasari, R. D. 2018. *Strategi Pengembangan Industri Keramik Dinoyo Oleh Dinas Koperasi dan UKM Sebagai Local Economic Development (Studi Pada Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang.
- Labib, M. M., Afifuddin, & Hayat. 2020. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah di Kabupaten Lumajang (Studi Pada Pasar Klakah)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 14, No. 4, Hal: 52–58.
- Lumowa, F., Najosan, H., & Pangemanan, S. E. 2021. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Governance*. Vol. 1, No. 2, Hal: 1–10.
- Maryanto, T., & Rakhim Syahida, A. 2019. *Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Hasil Penjualan di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang*. *Jurnal Komunikasi Nusantara*. Vol. 1, No. 1, Hal: 34–39.
- Maulidah, F. L., & Oktafia, R. 2020. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6, No. 3, Hal: 571.
- Maulidiah, D., Said, M., & Hayat. 2023. *Peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang)*. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 17, No. 9, Hal: 80–85.
- Mekarisce, A. A. 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*. Vol. 12, No. 3, Hal: 145–151.
- Mumtaz, F. K. 2024. *Dinamika Pengrajin di Sentra Kerajinan Keramik Dinoyo Kota Malang*. *International Waqaf Ilmu Nusantara Library*. Universitas Negeri Malang: Malang.
- Nainggolan, K. 2017. *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Sentra Industri Keramik Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Skripsi. Universitas Islam Malang: Malang.

- Nalini, S. N. L. 2021. *Dampak Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*. Vol. 4, No. 1, Hal: 662–669.
- Nila Kasih, D. A. P., Supriadi, M., & Saskara Yoga, I. P. A. 2024. *Implementasi Konsep Green Industry Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Vastuwidya*. Vol. 7, No. 2, Hal: 64–72.
- Pamungkas, R. S. 2021. *Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang.
- Pertiwi, H. K. W. A., Gani, A. J. A., & Said, A. 2013. *Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No. 2, Hal: 213.
- Prastika, H. C. 2017. *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*. Skripsi. Universitas Airlangga: Surabaya.
- Puspitasari, H. 2012. *Perencanaan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Menuju Ekonomi Kreatif*. Tesis. Universitas Brawijaya: Malang.
- Putra, T. G. 2015. *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 3, No. 1, Hal: 1–10.
- Rabbani, D. B. 2018. *Analisis Pengaruh Etika Bisnis Islami, Lokasi Usaha, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan (Studi Pada Pelaku Wirausaha Barang Bekas di Pasar Comboran Timur Kota Malang)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.
- Ronasifah, F., Ati, N. U., & Hayat. 2019. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 13, No. 3, Hal: 53–61.
- Rosintan, L., Soeharjoto, & Dewi, R. R. 2023. *Literasi Digital Bagi UMKM. Belalek: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Journal of Community Services)*. Vol. 1, No. 2, Hal: 67–72.
- Sari, D. 2017. *Peran Sentra Industri Keramik Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Sentra Industri Keramik Dinoyo Kota Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang.
- Setyawati, A., Ati, N. U., & Putra, L. R. 2024. *Strategi Pengembangan UMKM Kerajinan Keramik Dinoyo Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)*. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 18, No. 2, Hal: 18-32.

- Tasik, K., Londa, J. W., & Rembang, M. 2020. *Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Menginformasikan Program Badan Usaha Milik Desa Gwaan Kecamatan Mooat*. Jurnal Komunikasi. Vol. 20, No. 1, Hal: 1–16.
- Wahyuni, R. S. 2018. *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus Lima Rumah Kost di Kelurahan Gunung Sari)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Wibowo, R. S., & Ambarwati, D. 2022. *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021*. Journal of Governance Innovation. Vol. 4, No. 2, Hal: 141–152.
- Windasai, Said, M. M., & Hayat. 2021. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2, No. 2, Hal: 25–32.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Surat Edaran Walikota Malang No 5 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Pelaku Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

WEBSITE

- Badan Pusat Statistik. 2022. *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan Kota Malang*. <https://malangkota.bps.go.id> (diakses pada 10 Oktober 2024).
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa) 2021-2023*. <https://diskopukm.jatimprov.go.id> (diakses pada 15 Oktober 2024).
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kemenkop Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023*. <https://www.bps.go.id> (diakses pada 20 Oktober 2024).
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2019. *Pertumbuhan UMKM di Indonesia*. <https://www.kemenkopukm.go.id> (diakses pada 1 Oktober 2024).
- Kementerian Keuangan. 2018. *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Nasional*. <https://www.kemenkeu.go.id/> (diakses pada 1 Oktober 2024).

